

FAKTOR SOSIAL-EKONOMI YANG MEMPENGARUHI TINDAK KEJAHATAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

SOCIAL-ECONOMIC FACTORS AFFECTING CRIME ACTS IN WEST SUMATERA PROVINCE

Ega Steviani.H, Hefrizal Handra, Sry Maryati

Universitas Andalas

egastevianih@gmail.com, hefrizalhandra@gmail.com, srie_jayamahe@yahoo.co.id

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi tindak kejahatan di 19 kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2014-2018. Jenis data adalah data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). *Crime rate* Sumatera Barat pada tahun 2018 sebesar 243 termasuk 5 terbesar se Indonesia dan lebih tinggi dari DKI Jakarta, artinya resiko penduduk Sumatera Barat menjadi korban kejahatan lebih tinggi dari kota besar seperti DKI Jakarta. Ada banyak kerugian dari tingginya tindak kejahatan dalam suatu wilayah seperti kerugian ekonomi, psikologi bahkan fisik, aktivitas ekonomi masyarakat pun akan terganggu, banyak biaya yang harus dikeluarkan dan pada akhirnya bisa mengganggu stabilitas negara. Ada beberapa faktor sosial ekonomi yang dianalisa bagaimana pengaruhnya terhadap tindak kejahatan dengan indikator *crime rate* (CrimeCR) di Sumatera Barat, antaranya; pengangguran dengan indikator tingkat pengangguran terbuka (UnemploymentUNP), ketimpangan pendapatan dengan indikator *gini ratio* (IncomeInequalityINI), pendidikan dengan indikator rata-rata lama sekolah (EDU), usia dengan indikator proporsi penduduk laki-laki usia 15-29 tahun (AGE) dan penyelesaian kasus oleh kepolisian dengan indikator jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan oleh kepolisian (CC). Regresi data panel ini menggunakan Eviews 11. Hasil regresi menyatakan bahwa semua variabel sosial ekonomi yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap tindak kejahatan di Sumatera Barat, dengan R-square:0.96529

Kata Kunci : *kejahatan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, pendidikan, usia*

ABSTRACT : *This study aims to determine the socio-economic factors that influence crime in 19 districts and cities of West Sumatra Province from 2014-2018. The type of data is secondary data sourced from the Central Statistics Agency (BPS). West Sumatra's crime rate in 2018 was 243, including the 5th largest in Indonesia and higher than DKI Jakarta, meaning that the risk of West Sumatra residents becoming victims of crime is higher than big cities such as DKI Jakarta. There are many losses from the high crime rate in an area such as economic, psychological and even physical losses, the economic activity of the community will also be disrupted, many costs must be incurred and in the end it can disrupt the stability of the country. There are several socio-economic factors that affect crime with the crime rate indicator (CrimeCR) in West Sumatra, including; unemployment with the open unemployment rate indicator (UnemploymentUNP), income inequality with the Gini ratio indicator (IncomeInequalityINI), education with the average length of schooling indicator (EDU), age with an indicator of the proportion of the male population aged 15-29 years (AGE) and settlement cases by the police with an indicator of the number of crimes resolved by the police (CC). This panel data regression uses Eviews 11. The regression results state that all the socio-economic variables studied have a significant effect on crime in West Sumatra, with R-square: 0.96529.*

Keywords: *crime, unemployment, income inequality, education, age*

A. PENDAHULUAN

Upaya untuk memenuhi serta menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Banyak kerugian akibat tindakan melawan hukum seperti dari kerugian ekonomi, fisik, moral dan psikologis. Dalam pandangan ekonomi, kejahatan menimbulkan kerugian dengan adanya biaya yang harus dikeluarkan akibat dari tindakan itu. Kerugian tidak hanya ditanggung oleh korban, tetapi juga oleh masyarakat, dunia usaha, dan juga negara. Pelaku sendirian keluarganya juga akan ikut terdampak dari tindakan ilegal tersebut (Adri, 2019)

Crime rate Sumatera Barat pada tahun 2018 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 243, artinya dari 100.000 penduduk sebanyak 243 penduduk beresiko menjadi korban kejahatan. Angka *crime rate* Sumatera Barat ini termasuk 5 terbesar dari 33 provinsi se-Indonesia dan jika dibandingkan dengan *crime rate* DKI Jakarta hanya 137 *crime rate* Sumatera Barat jauh lebih tinggi, dapat disimpulkan bahwa penduduk Sumatera Barat lebih beresiko menjadi korban kejahatan dibanding penduduk ibu kota/ kota besar DKI Jakarta.

Ilmu ekonomi menasumsikan perilaku dan keputusan seseorang merupakan hal rasional. Seorang individu melihat keuntungan dan kerugian yang diharapkan dari kejahatan dan membandingkannya dengan keuntungan dan kerugian dari menjauhi kejahatan. Hal ini dijelaskan dalam Teori *Rational Choice*, yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan untuk meningkatkan utilitas (kepuasan), mereka akan mempertimbangkan dan membandingkan *benefit-cost* untuk memutuskan melakukan tindak kejahatan atau melakukan tindakan yang legal (Becker, 1974).

Carmichael (2001) menyatakan bahwa pengangguran pria adalah faktor yang paling mempengaruhi untuk tingkat kejahatan di Inggris. Lebih jauh lagi, mereka mengklaim bahwa sebagian besar kejahatan di Inggris secara positif terkait dengan pengangguran pria terlepas dari struktur usia. Raphael (2001) dalam Ajimotokin (2015) juga menyatakan bahwa ada korelasi positif antara tingkat kejahatan dan pengangguran. Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang menganggur di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data publikasi BPS dari tahun 2014- 2018 mengalami fluktuasi. Dari sebanyak 151.657 orang yang menganggur pada tahun 2014 menjadi 141.680 orang pada tahun 2018, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2018 sebesar 5,55 persen, lebih tinggi dari rata-rata TPT Indonesia yaitu sebesar 5,28 persen.

Center for Poverty Research (2018) dalam sensusnya yang pada tahun 2017, ditetapkan bahwa 39,7 juta orang yang tinggal di Amerika Serikat hidup dalam kemiskinan. Untuk menjaga diri mereka sendiri dan keluarga mereka, situasi putus asa memaksa mereka melakukan tindak kejahatan agar dapat bertahan hidup. Jumlah penduduk miskin Sumatera Barat pada tahun 2018 sebanyak 357.160 jiwa, dengan ketimpangan pendapatan yang diwakili oleh *gini ratio* Sumatera Barat sebesar 0,32 pada tahun 2017 dan 2018, sedangkan *crime rate* dari tahun 2017-2018 mengalami penurunan.

Menurut Lochner (2007), peningkatan pendidikan dapat meningkatkan upah, sehingga bisa meningkatkan *opportunity cost* dari kejahatan, Jika dilihat dari rata-rata lama sekolah penduduk Sumatera Barat yang selalu meningkat dari 8,29 tahun pada tahun 2014 menjadi 8,76 tahun pada tahun 2018 tentu diharapkan tindak kejahatan juga akan semakin berkurang sebagaimana pendapat Lochner (2004). Bentuk pencegahan kejahatan yang paling efektif dicapai melalui pendidikan. Kebanyakan orang akan berpendapat bahwa pendidikan dapat menjadi elemen penting dalam mencegah individu dari terlibat dalam perilaku kriminal (criminal-justice.iresearchnet.com). Namun dampak pendidikan bisa mencegah tindak kejahatan tidak berlaku pada *white-collar crime*. *White collar crime* cenderung membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi (Lochner, 2004) oleh karena itu pada penelitian ini tidak memasukkan kejahatan yang dilakukan oleh 'kerah putih' seperti korupsi dan pencucian uang.

Usia 15 – 29 adalah usia produktif untuk bekerja dan berpotensi besar untuk melakukan kejahatan dibandingkan usia lainnya dan semakin tinggi persentase pria pada usia 15-29 tahun dalam sebuah provinsi maka semakin tinggi pula peluang provinsi tersebut memiliki kejahatan. Menurut argumen Ramadhani (2012) yang menyebutkan bahwa paling banyak melakukan pencurian, salah

satunya adalah pencurian kendaraan bermotor yaitu pelaku yang berumur antara 15-30 tahun. Hal ini disebabkan karena pada usia antara 15 – 30 tahun pemikiran mereka masih banyak dipengaruhi oleh lingkungan, perubahan-perubahan sosial dan perkembangan masyarakat (Husnayain, 2007).

Jumlah tindak kejahatan yang berhasil diselesaikan oleh polisi menggambarkan kekuatan kepolisian dalam mengurangi kejahatan. Semakin banyak kejahatan yang berhasil diselesaikan oleh polisi artinya memperbesar peluang tertangkap bagi pelaku. Maka ketika kekuatan polisi bertambah akan mengurangi *crime rate* (Becki,1999). Becker(1974) dalam “ *Crime and Punishment : An Economic Approach*” melalui inisiasi model *rational criminal activity* menyatakan bahwa keputusan individu untuk menjadi kriminal atau tidak, didasarkan kepada analisis *benefit-cost*, apabila manfaat yang diperoleh (harta rampasan) melebihi biaya dari tindak kejahatan (peluang tertangkap dan biaya jika tertangkap). Dapat dikatakan pelaku kejahatan mengharapkan insentif berupa *net benefit* dari tindak kejahatan yang dilakukannya.

Menurut Sullivan (2012) melalui pendekatan ekonomi dengan asumsi dasar bahwa individu membuat keputusan berdasarkan pemikiran yang rasional tanpa mempertimbangkan benar salahnya suatu hal. Keputusan melakukan tindak kejahatan adalah keputusan yang rasional berdasarkan maksimisasi kepuasan (*maximum utility*). Becki (1999) dalam *Economics and Crime In States* menjelaskan bahwa model ekonomi dari kejahatan mengasumsikan bahwa pelaku kejahatan mencoba untuk membuat pilihan ekonomi yang rasional. Ada tiga *actor* yang dipertimbangkan ; pelaku kejahatan, rumah tangga yang tidak terlibat kejahatan dan pelaku bisnis yang sah, dan pemerintah. Dalam kerangka kerja sederhana, pelaku kejahatan menentukan penawaran kejahatan, dan seluruh masyarakat menentukan untuk permintaan kejahatan (perlindungan), pemerintah mempengaruhi keduanya (secara langsung berdasarkan permintaan dan secara tidak langsung melalui pasokan).

Penawaran kejahatan merupakan pilihan kegiatan antara bekerja pada pekerjaan legal atau di sisi lain melakukan kejahatan (illegal). Pilihan ini tergantung kepada hasil bersih dari tindak kejahatan atas semua biaya-biaya dari kejahatan tersebut. Biaya-biaya ini termasuk biaya langsung dari kejahatan, hilangnya pendapatan dari pekerjaan legal, dan ekspektasi hukuman dari kejahatan tersebut (denda, penangkapan dan sanksi lainnya). Penawaran kejahatan berhubungan positif dengan hasil bersih (*nett payoff*) dari tindak kejahatan, artinya pelaku kejahatan akan meningkatkan aktivitasnya ketika *nett payoff* meningkat. Kurva penawaran akan bergeser ke kanan ketika *nett payoff* dari kejahatan meningkat atau *return* dari kegiatan lain (non-kejahatan) menurun. Contoh kondisi yang bisa menyebabkan kurva penawaran kejahatan bergeser ke kanan seperti faktor demografi (meningkatnya proporsi usia muda), berkurangnya kesempatan bekerja pada upah biasa, dan pengurangan hukuman penjara. Pendidikan dan kesejahteraan juga bisa meningkatkan *opportunity cost* jika melakukan kejahatan melalui meningkatnya pendapatan.

Permintaan kejahatan bisa dijelaskan dalam dua elemen; pertama, permintaan atas kejahatan oleh pelaku kejahatan (rampasan/ hasil kejahatan), dimana kuantitas permintaan akan turun ketika hasil dari kejahatan menurun. Kedua, permintaan tidak langsung terhadap kejahatan yaitu berupa permintaan terhadap asuransi dan perlindungan , memiliki hubungan negatif dengan tindak kejahatan. Hubungan negatif ini muncul karena ketika kejahatan meningkat, individu meningkatkan upaya perlindungan pribadi (mulai dari mengunci pintu mereka hingga merekrut personel keamanan dan sebagainya), yang meningkatkan biaya langsung pelaku kejahatan dan karenanya mengurangi imbalan kejahatan (bagi pelaku kejahatan). Pemerintah disini diasumsikan menggerakkan ke keseimbangan menuju ke tingkat kejahatan lebih rendah

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh variabel pengangguran, ketimpangan pendapatan, pendidikan, usia, dan penyelesaian kasus oleh kepolisian secara parsial terhadap tindak kejahatan di Provinsi Sumatera Barat? Untuk menganalisis pengaruh variabel pengangguran, ketimpangan pendapatan, pendidikan, usia, dan penyelesaian kasus oleh kepolisian secara parsial terhadap tindak kejahatan di Provinsi Sumatera Barat

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan analisis data panel yang terdiri dari 19 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat dengan periode penelitian lima tahun dari 2014-2018. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Menggunakan variabel terikat yaitu Tindak Kejahatan dengan indikator *crime rate* (*CrimeCR*), dan lima variabel bebas yaitu; pengangguran (*UnemploymentUNP*) dengan indikator tingkat pengangguran terbuka, pendidikan (*EDU*) dengan indikator rata-rata lama sekolah, ketimpangan pendapatan (*Income Inequality*) dengan indikator *gini ratio*, dan penyelesaian kasus oleh kepolisian (*CC*) merupakan persentase tindak kejahatan yang berhasil diselesaikan oleh kepolisian dari total tindak kejahatan.

Analisis Induktif menggunakan regresi data panel dengan memilih pendekatan common effect, *fixed effect* atau *random effect*. Dalam menentukan pendekatan apa yang digunakan dalam estimasi panel, dilakukan pengujian Uji Chow dan Uji Hausman. Penelitian ini berpedoman pada penelitian Doyle (1999) dan Oliver (2002) dengan persamaan:

1. Model Doyle (1999) :

$$\ln PCRIME = \beta_1 \ln WAGE_{it} + \beta_2 \ln GINI_{it} + \beta_3 \ln YMEN_{it} + \beta_4 \ln PAP_{it} + \beta_5 \ln POLICE_{it} + \alpha_i + e_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana :

PCRIME adalah jumlah kejahatan per jumlah penduduk, WAGE merupakan upah, GINI adalah koefisien gini di suatu negara bagian, YMEN merupakan proporsi penduduk berjenis kelamin pria berusia 15-29 tahun, PAP merupakan kejahatan diselesaikan, POLICE merupakan proporsi petugas polisi terhadap populasi penduduk.

2. Model Oliver (2002) :

$$Cr = \beta_1 + \beta_2 \ln EDU + \beta_3 \ln ENRL + \beta_4 \ln GDP + \beta_5 \ln Gini + \beta_6 \ln UNEMP + \beta_7 \ln INCAR + \beta_8 \ln PLC + \beta_9 \ln AGE + u_i \dots \dots \dots (2)$$

Dimana :

Cr dalam penelitian ini merupakan *crime rate*, EDU merupakan populasi yang mencapai pendidikan diploma, ENRL adalah persentase populasi yang mendaftar pada sekolah menengah, Gini untuk Gini ratio, UNEMP adalah tingkat pengangguran, INCAR jumlah yang dipenjarakan per 100.000 penduduk, PLC adalah jumlah polisi per 100.000 penduduk, AGE merupakan variabel usia dari populasi dibawah umur 25 tahun.

Dengan mengadopsi dua model diatas Doyle (1999) dan Oliver (2002), maka formulasi model estimasi yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$CrimeCR = \beta_0 + \beta_1 UnemploymentUNP_{it} + \beta_2 IncomeInequalityINI_{it} + \beta_3 EDU_{it} + \beta_4 AGE_{it} + \beta_5 CC_{it} + u_i \dots \dots \dots (3)$$

Dimana :

- CrimeCR* adalah Tindak Kejahatan, dengan indikator *crime rate*.
- UnemploymentUNP* adalah Pengangguran, dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka
- EDU* (*education*) adalah Pendidikan, dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah.
- AGE* adalah Usia, dengan indikator proporsi penduduk berjenis kelamin pria berusia 15-29 tahun
- IncomeInequalityINI* adalah ketimpangan pendapatan, dengan indikator *gini ratio*.

CC (Crime Clearance Rate) adalah Kasus yang diselesaikan. Penyelesaian tindak kejahatan oleh polisi atau probabilitas tertangkap. Dinyatakan dalam Persen.

Selanjutnya melakukan uji asumsi kalsik seperti uji normalitas sebaran data, uji multikolinearitas, selanjutnya juga melakukan uji statistik seperti koefisien determinasi (R^2), uji t dan uji F.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regresi data panel

Dari Uji Chow dan Uji Hausman didapat pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah *fixed effect* (FE).

Tabel 1. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test				
Equation: Untitled				
Test cross-section random effects				
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	
Cross-section random	72.400809	5	0.0000	

Nilai Cross-section random: 72.400809 dg p value: 0.000 < 0,05 maka terima H_1 atau yang berarti model yang lebih baik adalah FE dari pada RE. Lalu FE dengan Perhitungan *General Least Square* (*Cross Section Weight* dengan Koefisien Estimasi *White Cross Section*) yang disebut dengan *Feasible General Least Square* (FGLS) dengan koefisien estimasi *White Cross Section*

Tabel 2. Feasible General Least Square (FGLS) dengan koefisien estimasi White Cross Section

Dependent Variable: CRIMECR				
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)				
Date: 08/04/20 Time: 22:38				
Sample: 2014 2018				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 19				
Total panel (balanced) observations: 95				
Linear estimation after one-step weighting matrix				
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)				
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1206.392	121.0793	9.963656	0.0000
UNEMPLOYMENTUNP	3.905136	1.038538	3.760225	0.0003
EDU	-151.3300	12.17385	-12.43074	0.0000
AGE	3004.066	95.53687	31.44404	0.0000
INEQUALITYINCOMEIN				
I	409.0113	47.64137	8.585212	0.0000
CC	-1.306577	0.293270	-4.455202	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.973785	Mean dependent var	423.6601	
Adjusted R-squared	0.965292	S.D. dependent var	261.8109	
S.E. of regression	51.55164	Sum squared resid	188687.6	
F-statistic	114.6673	Durbin-Watson stat	1.796004	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.961561	Mean dependent var	333.9474	
Sum squared resid	232817.9	Durbin-Watson stat	1.359231	

Dengan *Feasible General Least Square (FGLS)* dengan koefisien estimasi *White Cross Section* membuat model menjadi kebal atau robust terhadap pelanggaran asumsi antara lain heteroskedastisitas dan autokorelasi. Sehingga tidak perlu lagi dilakukan uji heteroskedastisitas dan autokorelasi

2. Uji Asumsi Klasik

a) Uji normalitas sebaran data

Selanjutnya dilakukan Uji Normalitas pada Residual (galat taksiran atau selisih antara Y dengan Y Prediksi) menggunakan Uji Jarque-Bera .P Value 0,342711 > 0,05 maka terima H_0 atau yang berarti residual berdistribusi normal sehingga telah memenuhi asumsi normalitas.

b) Uji Multikolinearitas

Menunjukkan ada tidaknya hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas Antar Variabel

	CRIMECR	UNEMPLOYMENTUNP	EDU	AGE	INEQUALITYINCOMEINI	CC
CRIMECR	1	0.5241813849901422	0.832768085456842	0.5032014044881466	0.5870704933073299	0.02248100821830438
UNEMPLOYMENTUNP	0.5241813849901422	1	0.5149695807310949	0.1887408113410606	0.3313739340984461	0.1790956658213028
EDU	0.832768085456842	0.5149695807310949	1	0.2509987093507092	0.521182393168921	0.03890171467525716
AGE	0.5032014044881466	0.1887408113410606	0.2509987093507092	1	0.3054950101625094	0.04813812675158619
INEQUALITYINCOMEINI	0.5870704933073299	0.3313739340984461	0.521182393168921	0.3054950101625094	1	0.2193168498959084
CC	0.02248100821830438	0.1790956658213028	0.03890171467525716	0.04813812675158619	0.2193168498959084	1

Hasil uji korelasi antar variabel bebas diatas, tidak ada korelasi kuat antar variable bebas yang nilai koefisien korelasinya > 0,9 atau < -0,9 maka model bebas dari masalah multikolinearitas.

Tabel 4. Persamaan hasil regresi FGLS dengan *White Cross Section* :

```

Estimation Command:
=====
LS(CX=F, WGT=CXDIAG, COV=CXWHITE) CRIMECR C UNEMPLOYMENTUNP EDU AGE
INEQUALITYINCOMEINI CC

Estimation Equation:
=====
CRIMECR = C(1) + C(2)*UNEMPLOYMENTUNP + C(3)*EDU + C(4)*AGE + C(5)*INEQUALITYINCOMEINI +
C(6)*CC + [CX=F]

Substituted Coefficients:
=====
CRIMECR = 1206.3924286 + 3.9051362376*UNEMPLOYMENTUNP - 151.330005022*EDU + 3004.06550813*AGE
+ 409.011300852*INEQUALITYINCOMEINI - 1.30657748964*CC + [CX=F]

```

Maka Persamaan Regresi FGLS dengan Koefisien estimasi *White Cross Section* adalah:

$$CrimeCR = 1206.3924286 + 3.9051362376 UnemploymentUNP - 151.330005022 EDU + 3004.06550813 AGE + 409.011300852 IncomeInequalityINI - 1.30657748964 CC + [CX=F]$$

Dimana 1206.3924286 adalah konstanta yang kemudian sebagai intersept nilainya ditambahkan dengan $[CX=F]$ atau efek individu.

3. Uji Statistik

c) Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai $R^2 = 0.97378$ dengan Adjusted $R^2 = 0.96529$ maka sekumpulan variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 0.96529 atau 96,52% dimana $> 0,5$ maka sekumpulan variabel bebas kuat dalam menjelaskan variabel terikat dan signifikan sebab uji simultan menunjukkan terima H_1 . Sehingga terdapat $100\% - 96,52\% = 3,48\%$ nilai variabel terikat yang dipengaruhi oleh faktor diluar variabel bebas dalam penelitian.

d) Uji t

Tabel 5. Uji t

Variabel	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Kesimpulan	Jawaban Hipotesis	Pengaruh Terhadap Cashetr
C	1206.392	121.0793	9.96365	0.0000			
UnemploymentU NP	3.905136	1.038538	3.760225	0.0003	$< 0,05$	Tolak H_0	Berpengaruh signifikan secara parsial
EDU	-151.3300	12.17385	-12.43074	0.0000	$< 0,05$	Tolak H_0	Berpengaruh signifikan secara parsial
AGE	3004.066	95.53687	31.44404	0.0000	$< 0,05$	Tolak H_0	Berpengaruh signifikan secara parsial
IncomeInequality INI	409.0113	47.64137	8.585212	0.0000	$< 0,05$	Tolak H_0	Berpengaruh signifikan secara parsial
CC	-1.306577	0.293270	-4.455202	0.0000	$< 0,05$	Tolak H_0	Berpengaruh signifikan secara parsial

e) Uji F

Uji Simultan: Nilai F hitung atau F-statistic: 18.50047 dg p value atau Prob(F-statistic): 0.000000 $< 0,05$ maka terima H_1 atau yang berarti secara serentak semua var bebas signifikan dalam mempengaruhi variabel terikat.

Pembahasan.

1. Pengaruh Pengangguran terhadap Tindak Kejahatan

Berdasarkan uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan pengangguran dengan indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindak kejahatan di Provinsi Sumatera Barat. Artinya, perubahan yang terjadi pada pengangguran akan mengakibatkan perubahan pada tindak kejahatan, ketika pengangguran meningkat maka tindak kejahatan di Provinsi Sumatera Barat juga akan meningkat. Kondisi menganggur dan tidak memiliki pendapatan bisa membuat seseorang nekad melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Raphael (2001) dalam Ajimotokin (2015) juga menyatakan bahwa ada korelasi positif antara tingkat kejahatan dan pengangguran. Dari sudut pandang sosiologis Britt (1994) menjelaskan adanya hubungan antara pengangguran dan kejahatan, dikarenakan ketika kondisi ekonomi memburuk, orang akan termotivasi melakukan kejahatan sebagai sumber pendapatan.

2. Pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Tindak Kejahatan

Variabel ketimpangan pendapatan diwakili oleh gini ratio berdasarkan uji hipotesis berpengaruh signifikan dan positif terhadap tindak kejahatan di Provinsi Sumatera Barat. Artinya, perubahan dari ketimpangan pendapatan akan berpengaruh terhadap tindak kejahatan, ketika ketimpangan pendapatan meningkat maka tindak kejahatan juga akan meningkat. Sesuai dengan pendapat Bourguignon (2001) menyatakan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di masyarakat diindikasikan akan berdampak terhadap perekonomian dan sisi kehidupan lainnya salah satunya kriminalitas atau kejahatan. Dengan tingkat konsistensi yang tidak biasa dalam ilmu sosial, orang-orang kelas bawah, dan orang-orang tinggal di daerah kelas bawah, memiliki tingkat kejahatan resmi yang lebih tinggi daripada kelompok lain (Braithewaite, 1979).

Dampak negatif dari ketimpangan yang mencolok adalah inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial, dan solidaritas. (Todaro, 2011). Ketimpangan pendapatan disuatu daerah akan menimbulkan kecemburuan sosial sehingga memicu masyarakat untuk melakukan tindak kejahatan.

3. Pengaruh Pendidikan terhadap Tindak Kejahatan

Pendidikan dengan indikator rata-rata lama sekolah berdasarkan uji hipotesis berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tindak kejahatan di Provinsi Sumatera Barat. Artinya, perubahan dari pendidikan akan berpengaruh terhadap tindak kejahatan, dan ketika pendidikan (rata-rata lama sekolah) penduduk meningkat maka tindak kejahatan akan menurun. Pendidikan dikenal sebagai key success factor dalam pembangunan ekonomi, pendidikan akan menambah pengetahuan dan juga keterampilan sehingga akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan legal, sesuai dengan penelitian Lochner (2007), peningkatan pendidikan dapat meningkatkan upah, sehingga bisa meningkatkan opportunity cost dari kejahatan. Tingginya opportunity cost akan membuat individu tersebut memilih melakukan pekerjaan legal (menghindari kejahatan) karena benefit yang diterima dari pekerjaan legal lebih tinggi. Menurut Lochner partisipasi sekolah juga akan lebih efektif mengurangi kenakalan dan kejahatan apabila disertai dengan lingkungan dan teman sebaya yang lebih baik, peningkatan skill non-kognitif, hingga perubahan preferensi untuk bersikap lebih baik.

4. Pengaruh Usia terhadap Tindak Kejahatan

Variabel usia dengan indikator proporsi penduduk laki-laki usia 15-29 tahun terhadap jumlah populasi penduduk di Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan hasil uji hipotesis menyatakan bahwa variabel usia berpengaruh signifikan. Artinya, perubahan usia penduduk laki-laki usia 15-29 tahun akan berpengaruh pada tindak kejahatan, ketika usia bertambah maka tindak kejahatan juga akan meningkat.

Hal ini sesuai dengan penelitian Husnayain (2006) menyatakan bahwa usia 15 – 29 adalah usia produktif untuk bekerja dan berpotensi besar untuk melakukan kejahatan dibandingkan usia lainnya dan semakin tinggi persentase pria pada usia 15-29 tahun dalam sebuah provinsi maka semakin tinggi pula peluang provinsi tersebut memiliki kejahatan.

Steffensmier (2019) juga menyatakan usia pelaku tindak kejahatan dengan kekerasan dan tindak kejahatan terhadap barang di Amerika Serikat adalah pemuda berusia 18-29 tahun, di Taiwan usia terbanyak adalah 30-44 tahun, dan India untuk kejahatan terhadap barang pelakunya terbanyak berusia 18-29 tahun.

Terlibatnya pemuda usia muda dalam tindak kejahatan tidak terlepas dari kurangnya keterampilan mereka untuk bisa masuk ke dunia kerja legal. Selain itu lingkungan pergaulan yang salah akan mempengaruhi untuk melakukan tindakan yang melawan hukum, usia muda merupakan usia labil secara psikologis sehingga sangat gampang terpengaruh.

5. Pengaruh Penyelesaian kasus oleh kepolisian terhadap Tindak Kejahatan

Penyelesaian kasus (kejahatan) oleh kepolisian (clearance crime) menggambarkan kekuatan kepolisian. Semakin banyak kasus yang berhasil diselesaikan oleh kepolisian akan memperkecil utility expectation dengan memperbesar probabilitas tertangkap bagi pelaku kejahatan. Hasil uji hipotesis penelitian ini sesuai dengan teori ini, menyatakan bahwa penyelesaian kasus oleh kepolisian berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tindak kejahatan. Artinya ketika semakin banyak kasus kejahatan yang berhasil diselesaikan oleh kepolisian maka tindak kejahatan akan semakin berkurang.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Semua variabel bebas pada penelitian ini; pengangguran, ketimpangan pendapatan, pendidikan, usia dan penyelesaian kasus oleh kepolisian terhadap variabel terikat (tindak kejahatan) berdasarkan uji hipotesis adalah signifikan, sesuai dengan teori yang dikemukakan.

Variabel pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan usia memiliki hubungan yang positif terhadap variabel tindak kejahatan, artinya ketika masing-masing variabel bebas ini meningkat maka tindak kejahatan di Provinsi Sumatera Barat juga akan meningkat. Dua variabel bebas lainnya yaitu pendidikan dan penyelesaian kasus oleh kepolisian berhubungan negatif terhadap tindak kejahatan, ketika pendidikan ataupun penyelesaian kasus oleh kepolisian meningkat maka tindak kejahatan akan semakin menurun. Hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat pada penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan teori yang penulis pedomani.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar ada upaya untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk agar juga berimbas pada berkurangnya jumlah tindak kejahatan. Masih ada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki rata-rata lama sekolah dibawah 9 tahun, atau hanya setara kelas 7-8 SMP, bahkan Kepulauan Mentawai hanya memiliki rata-rata lama sekolah setara kelas 6 sekolah dasar. Selain peningkatan tahun lama belajar penulis juga berharap ada peningkatan kualitas pendidikan terutama pendidikan karakter bagi para pelajar. Pembentukan karakter dan lingkungan yang baik bisa menjadi salah satu pencegah meningkatnya tindak kejahatan pada kaum muda.

Penelitian ini juga masih banyak kekurangan, data tindak kejahatan yang digunakan disini merupakan *crime reported* dari kepolisian melalui publikasi BPS, data ini mungkin saja tidak menggambarkan tindak kejahatan secara faktual atau *under reported*, jumlah aktualnya bisa jadi jauh lebih banyak. Oleh karena itu disarankan kepada peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian secara langsung dengan menggunakan data primer.

E. DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. 2011. *Statistik Kriminal 2011*. Jakarta Pusat
- [BPS] Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2017. *Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2017*. Padang
- _____, 2018. *Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2018*. Padang
- _____, 2019. *Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2019*. Padang

- Adri, Sandy. 2019. *Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Perilaku Kriminalitas Narapidana Di Sumatera Barat*. Fakultas Ekonomi: Universitas Andalas
- Ajimoto, Sandra et al. 2015. *The Effect Of Unemployment On Crime Rates in The US*. https://www.academia.edu/28549017/The_Effects_of_Unemployment_on_Crime_Rates_in_the_US [diakses pada 2 Desember 2019]
- Becker, Gary S. 1974. *Crime and Punishment: An Economic Approach*. The Journal of Political Economy, National Bureau of Economic Research.
- Becsi, Zsolt, 1999. *Economics and Crime in the State Atlanta*. Atlanta: Federal Reserve Bank of Atlanta.
- Bourguignon, F. J. 2001. *Crime as A Social Cost of Poverty and Inequality: A Review Focusing on Developing Countries*. World Bank Discussion Paper
- Brand, Sam, Price, Robert. 2000. *The economic and social; costs of crime*. Home
- Carmichael, Fiona and Robert Ward. 2001. *Male Unemployment and Crime in England and Wales*. Economics Letters.
- Chester L. Britt. 1994. *Crime and Unemployment Among Youths in the United States, 1958-1990*. American Journal of Economics and Sociology, Vol. 53.
- Doyle, Joanne M, Ehsan Ahmed and Robert N. Horn. 1999. *The Effect of Labor Market and Income Inequality on Crime: Evidence from Panel Data*. Southern Economic Journal
- Hakim, Rizki Abinul. 2009. *Analisis Determinan Tingkat Kejahatan Properti di Pulau Jawa*. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia
- Hendri, Davy. 2014. *Crime: A Dark Side of Income Distribution Inequality*. Journal of Public Policy Economics, Vol.5, No.2.
- Husnayain, I. 2007. *Analisis Ekonomi Kejahatan Properti di Indonesia Tahun 2005*. Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Kartini, Kartono. 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Lochner, Lance & Moretti, E. 2004. *The Effect of Education on Crime: Evidence from Prison Inmates, Arrests, and Self-Report*. The American Economic
- Lochner, Lance. 2007. *Education and Crime*. Ontario : University of Western Ontario office research study. London: Home Office.
- O'Flaherty, B & Sethi, R. 2015. *Urban Crime*. Handbook of Urban and Regional Economic. Santa Fe: Elsevier B.V
- Ramadhani, Fadli. 2012. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Oknum Mahasiswa Di Wilayah Kota Makassar*. Review Vol 94
- Steffensmeier, D & Kumar, S. 2019. *Age-Crime Relation in India: Similarity or Divergence vs. Hirschi/Gottfredson Inverted J-Shape Projection?*. The British Journal of Criminology.
- Sullivan, Arthur O'. 2012. *Urban Economics*. 8th edition. New York: Mcgraw-Hill.